

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 118 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PETUGAS PENGELOLA PERSEDIAAN UNIT KERJA ESELON II
TAHUN ANGGARAN 2016 PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang persediaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan barang /Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Tentang Petugas Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2016 Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PETUGAS PENGELOLA PERSEDIAAN UNIT KERJA ESELON II TAHUN ANGGARAN 2016 PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Petugas Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2016 Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pemasukan dan pembaharuan data ke dalam Aplikasi Persediaan dan Sistem Informasi Rumah Tangga;
 - b. Menyusun laporan persediaan periode Semester I, II dan Tahunan;
 - c. Mendokumentasikan arsip barang persediaan;
 - d. Melaksanakan cek fisik barang persediaan; dan
 - e. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan barang persediaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Petugas Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II melakukan koordinasi dengan Biro Umum dan Keuangan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Biro/Direktur di Unit Kerja Eselon II.

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan dihitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2016.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Keputusan ini, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 dihitung sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19 Mei 2016
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan LKPP;
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Umum dan Keuangan LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PETUGAS
PENGELOLA PERSEDIAAN UNIT
KERJA ESELON II TAHUN
ANGGARAN 2016 PADA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 118 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 Mei 2016

TIM PETUGAS PENGELOLA PERSEDIAAN UNIT KERJA ESELON II TAHUN
ANGGARAN 2016 PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No	Nama	Unit Kerja Eselon II	Honorarium (Rp)
1.	Setiawan Rahandi Sabri	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	300.000
2.	Elvi Egyasti	Biro Umum dan Keuangan	300.000
3.	Imelda Liliana	Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian	300.000
4.	Fenita Enggraini	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	300.000
5.	Oktrita Purwantari Rahayu	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	300.000
6.	Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	300.000
7.	Eva Ayuga Ningrum	Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	300.000
8.	Lulu Haryani	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	300.000
9.	Linggar Lailatussaadah Inhardy	Direktora Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	300.000
10.	Kemala De Kristie	Direktorat Pengembangan Profesi	300.000
11.	Juniarty Erika MS	Direktorat Pelatihan Kompetensi	300.000
12.	Manshur Riadli	Direktorat Sertifikasi Profesi	300.000
13.	Dian Arsita Wardhani	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I	300.000

14.	Hendra Damendra Numberi	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah II	300.000
15.	Febri Kamalisa Rachman	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	300.000
16.	Estu Retno Yulianti	Inspektorat	300.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO